

**PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LABUHAN BATU
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HAK GUNA USAHA PRESPEKTIF
SIYASAH SYAR'IYYAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
Ahmad Sauki
2213030044

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1448 H/2026 M**

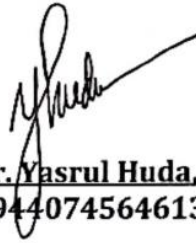
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul **Peran Badan Pertanahan Dalam Penyelesaian Konflik Hak Guna Usaha Prespektif Siyasah Syar'iyah** yang disusun oleh **Ahmad Sauki** dengan NIM 2213030044 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

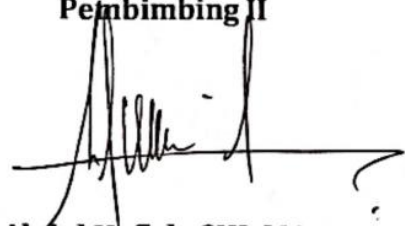
Padang, Juni 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Yasrul Huda, MA
NUPTK. 9440745646130082

Pembimbing II



Abdul Hafizh, SHI, MA
NIP.19871006201931001

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "**Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu Dalam Penyelesaian Konflik Hak Guna Usaha Perspektif *Siyasah Syar'iyah***" yang disusun oleh Ahmad Sauki dengan NIM 2213030044. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

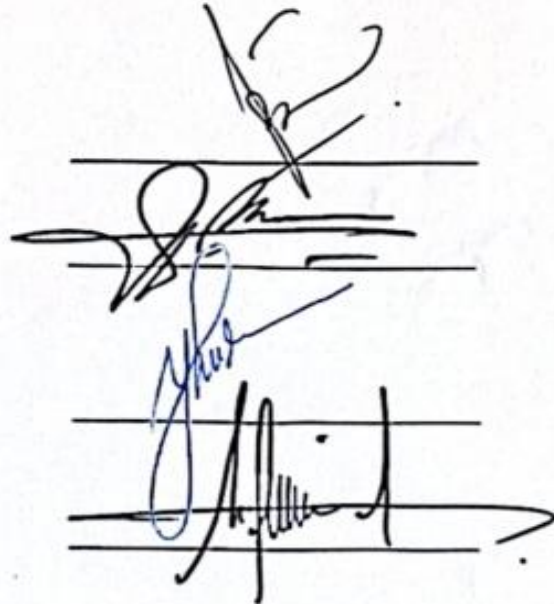
Disahkan di : Padang
Tanggal : 30 Juni 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Tiwarni, M.Ag.
NIP. 197803312003122003
Penguji I

Dr. Syafruddin Halimy K., M.A.
NIP. 196407292001121004
Penguji II

Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A.
NUPTK. 9440745646130082
Penguji III/ Pembimbing I

Abdul Hafizh, S.H.I., M.A.
NIP. 19871006201931001
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alifadli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu Dalam Penyelesaian Konflik Hak Guna Usaha Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”** benar merupakan hasil karya penulis. Karya ilmiah ini bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi ataupun karya ilmiah yang sudah dipublikasikan atau pernah digunakan untuk memperoleh gelar keserjanaan di UIN Imam Bonjol Padang ataupun di perguruan tinggi lainnya, kecuali bagian yang sumber informasinya yang telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi yang penulis buat ini merupakan hasil plagiasi atau tidak orisinal, maka penulis bersedia untuk dibatalkan keabsahan skripsi ini dengan gelar keserjanaan penulis.

Padang, 16 Juni 2026



Ahmad Sauki
2213030044

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sauki
NIM : 2213030044
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan
Batu Dalam Penyelesaian Konflik Hak Guna Usaha
Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

Dengan ini menyatakan persetujuan atas publikasi karya ilmiah ini
untuk kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang.

Padang, 16 Juni 2026



Ahmad Sauki
2213030044

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillah rabbi'alam, segala puji syukur senantiasa tucurahkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan kekuatan yang selalu dianugerahkan kepada penulis. Sehingga nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terhingga diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LABUHAN BATU DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HAK GUNA USAHA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH"**. Sholawat dan salam penulis doakan kepada baginda kekasih Allah serta panutan seluruh umat Nabi yullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga terang benderang serta memiliki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan hingga sampai sekarang.

Kata pengantar ini penulis mengutarakan, bahwa penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses penulisan skripsi ini tidak diselesaikan begitu saja, namun terdapat motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahanda (Ahmad Tarmizi) dan Mamak tersayang (Bahriah). Meskipun Ayah dan Mamak tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang anak laki-laki yang kuat,

bertanggungjawab, selalu berjuang dan mandiri, semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan Mamak lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak Laki-laki keduanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga ayah dan Mamak selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang. Selanjutnya penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.P.d beserta Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Ibu Prof. Nelmawarni, S.Ag, M.Hum., Ph.D selaku Wakil Rektor III serta Instansi terkait yang berada didalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Ibu Prof. Salma, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Eskarni Ushalli, M.A., Lc. Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah Hukum Tata Negara yang telah memberikan fasilitas, kesempatan menimba Ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, MA. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan serta arahan untuk kelancaran perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, MA. sebagai Pembimbing I dan Bapak Abdul Hafizh, SHI.,MA. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan Ilmu, nasehat, arahan serta membantu dan membimbing penulis

dengan ikhlas, sabar, dan tanggungjawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Informan dan responden, atas kesempatan dan informasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Kakak (Risda) selaku saudara kandung penulis, terimakasih motivasi, nasehatnya yang telah menuntun penulis dalam pembuatan penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh keluarga besar Lubis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan ribuan terimakasih atas segala nasehat dan motivasinya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah selalu memberikan umur panjang dan membalas semua kebaikan dan ketulusan Bapak/Ibu kepada penulis dan semua pihak yang ikut dalam partisipasi penulisan skripsi ini. Penulis memohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosan yang penulis sengaja dan tidak sengaja yang telah penulis lakukan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi Ilmu pengetahuan. Amiin Ya Rabbal'alam.

Padang, 9 Juni 2026
Penulis



Ahmad Sauki
NIM. 2213030044

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu Dalam Penyelesaian Konflik Hak Guna Usaha Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”, yang ditulis oleh Ahmad Sauki, NIM. 2213030044 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai regulasi yang mengatur mengenai penyelesaian konflik pertanahan. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dalam penyelesaian konflik Hak Guna Usaha serta kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyasah syar’iyyah*. Adapun pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana peran bpn kabupaten labuhan batu dalam penyelesaian konflik hak guna usaha berdasarkan Permen Nomor 21 Tahun 2020? 2) Bagaimana pandangan prinsip-prinsip *siyasah syar’iyyah* dalam penyelesaian konflik hak guna usaha di Kabupaten Labuhan Batu?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan instansi BPN Kabupaten Labuhan Batu, pihak yang berkonflik, dokumentasi berupa dokumen print out luas peruntukan HGU dari instansi BPN Kabupaten Labuhan Batu, foto dokumen terkait luas HGU yang dikonflikkan, serta peta lahan yang dikonflikkan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal dan literature hukum. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data serta menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu telah menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, yakni sebagai mediator dalam proses mediasi, melakukan pengukuran ulang lahan sengketa, memeriksa keabsahan sertifikat HGU, menerima pengaduan, serta merekomendasikan pembatalan atau perubahan HGU melalui Tim Panitia B. 2) Dalam pandangan prinsip-prinsip *siyasah syar’iyyah* dalam praktik ini sudah sesuai dengan prinsip musyawarah, keadilan, perdamaian, kesejahteraan, amanah, ketaatan rakyat dan kemaslahatan.

Kata Kunci: *Siyasah Syar’iyyah*, Konflik, dan Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Konflik.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Signifikansi Penelitian	7
1.6 Studi Literatur.....	7
1.7 Kerangka Teori.....	10
1.8 Metode Penelitian.....	15
 BAB II TEORI KONFLIK DAN SIYASAH SYAR'IYYAH	 18
2.1 Teori Konflik.....	18
2.1.1 Pengertian Konflik.....	18
2.1.2 Faktor Sebab Terjadinya Konflik.....	21
2.1.3 Resolusi Konflik.....	24
2.2 <i>Siyasah Syar'iyah</i>	27
2.2.1 Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i>	27
2.2.2 Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Syar'iyah</i>	28
 BAB III MONOGRAFI KABUPATEN LABUHAN BATU DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LABUHAN BATU	 35
3.1 Profil Kabupaten Labuhan Batu.....	35
3.1.1 Sejarah Kabupaten Labuhan Batu.....	35
3.1.2 Letak Geografis Kabupaten Labuhan Batu	37

3.1.3 Penduduk dan Mata Pencarian Kabupaten Labuhan Batu	42
3.1.4 Keagamaan Kabupaten Labuhan Batu	45
3.1.5 Sarana Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu	47
3.2 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Labuhan Batu	49
3.2.1 Pengertian Badan Pertanahan Nasional (BPN)	49
3.2.2 Tugas dan Wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN)	50
3.2.3 Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN)	52
 BAB IV PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LABUHAN BATU DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HAK GUNA USAHA PERSPEKTIF <i>SIYASAH SYAR'IIYYAH</i>	 55
4.1. Deskripsi Konflik	55
4.2. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dalam Penyelesaian Konflik Hak Guna Usaha	56
4.2. Pandangan Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Syar'iiyyah</i>	68
 BAB V PENUTUP	 79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
 DAFTAR PUSTAKA	 81
LAMPIRAN	86
BIODATA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu.....	39
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu	42
Tabel 3.3	Mata Pencarian Masyarakat Kabupaten Labuhan Batu	44
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Labuhan Batu.....	45
Tabel 3.5	Sarana Ibadah Yang Ada di Kabupaten Labuhan Batu.....	46
Tabel 3.6	Jumlah Agama Yang Dianut Menurut Kecamatan Labuhan Batu.....	46
Tabel 3.7	Sarana Pendidikan di Kabupaten Labuhan Batu.....	48
Tabel 3.10	Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara.....	39
Gambar 3.2 Tujuan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu ..	50
Gambar 3.3 Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu	51